

**ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP REZIM
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
STUDI KASUS : LIBERALISASI JASA KEUANGAN
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan International**



Disusun Oleh :

MARCELLIO SUSANTO

07041281722071

JURUSAN STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNATIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
“ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP REZIM ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES STUDI KASUS :
LIBERALISASI JASA KEUANGAN”

Oleh :

Marcellio Susanto

07041281722071

Pembimbing I

1. Dra. Retno Susilowati, MM

NIP 195905201985032003

Tanda Tangan



Tanggal

05 Juli 2022

Pembimbing II

2. Ferdiansyah R, S.IP., MA

NIP 198904112019031013



06 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**"ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP REZIM ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES STUDI KASUS : LIBERALISASI
JASA KEUANGAN"**

Skripsi
Oleh :
Marcelllo Susanto
07041281722071

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal

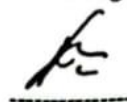
Pembimbing :

1. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP 195905201985032003

Pembimbing II

2. Ferdiansyah R, S.IP., MA
NIP 198904112019031013

Tanda Tangan

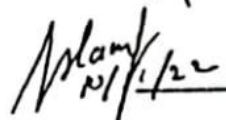


Penguji :

1. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A
NIP 199104092018032000

2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.
NIP 199012062019032017

Tanda Tangan

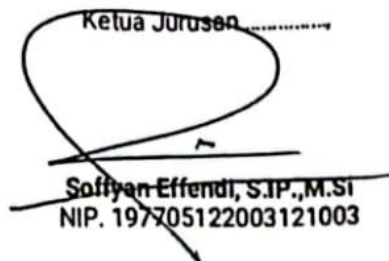


Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah, serta kekuatan sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Papa, Mama, Tio, Grace yang selalu memberikan do'a, memberikan dukungan serta menghibur dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang memberikan Ilmu dan juga Pengalamannya.
3. Para sahabat-ku yang telah banyak memberikan semangat dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP REZIM ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES STUDI KASUS : LIBERALISASI JASA KEUANGAN

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rezim *Asean Framework Agreement On Services* studi kasus Liberalisasi Jasa Keuangan. Indonesia telah meratifikasi *AFAS* dan menjadi bagian didalam nya, Indonesia pertama kali meresmikan *AFAS* pada KTT ke-5 ASEAN pada 15 Desember 1995, dengan harapan dapat memobilitas perdagangan jasa, meningkatkan arus perdagangan jasa dan secara progresif menghapus pembatasan sehingga meningkatkan akses pasar. Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap *AFAS* menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengolahan data sekunder. Penulis menggunakan Teori Kepatuhan Rezim dengan dimensi analisis *Output, Outcomes, dan Impact* sehingga penulis dapat menentukan kepatuhan Indonesia terhadap *AFAS*. Perjanjian yang telah diratifikasi diadopsi menjadi kebijakan di Indonesia, membuat perubahan dalam perdagangan jasa keuangan di Indonesia. Sehingga terjadi pengaruh yang dominan positif dalam subsektor perbankan dan perasuransian, seperti kenaikan profitabilitas perbankan di Indonesia, dan juga peningkatan aset perusahaan asuransi di Indonesia yang memberikan kapasitas lebih bagi perusahaan asuransi untuk memberikan proteksi bagi individu maupun pelaku di Indonesia.

Kata Kunci : *AFAS, Kepatuhan Rezim, Perdagangan Jasa Keuangan.*

Pembimbing 1



Dra. Retno Susilowati, MM
NIP 195905201985032003

Pembimbing 2



Ferdiansyah R, S.IP., MA
NIP 198904112019031013

Ketua Jurusan



Soffyan Effendi, S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

This research discusses Indonesia's compliance with the Asean Framework Agreement on Services, a case study of financial services liberalization. Indonesia has ratified AFAS and is a part of it. Indonesia first inaugurated AFAS at the 5th ASEAN Summit on December 15, 1995, with the hope of mobilizing trade in services, increasing the flow of trade in services, and progressively increasing market access. This study aims to analyze Indonesia's compliance with AFAS using qualitative research methods and secondary data processing. The author uses regime compliance theory with an analysis of the output, outcome, and impact dimensions so that he can determine Indonesia's compliance with AFAS. The agreement was adopted into policy in Indonesia, making changes in the trade in financial services in that country. so that there is a dominant positive influence in the banking and insurance sub-sector, such as an increase in banking profitability in Indonesia and also an increase in the assets of insurance companies in Indonesia, which provides more capacity for insurance companies to provide protection for individuals and actors in Indonesia.

Keywords: *AFAS, regime compliance, financial services trading.*

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marcellio Susanto
Nim : 07041281722071
Prodi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Analisis Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim Asean Framework Agreement On Services Studi Kasus : Liberalisasi Jasa Keuangan adalah 0%. Dicek oleh operator UPT Perpustakaan

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Menyetujui
2022
Dosen pembimbing,
Yang menyatakan,



Nama: Dra. Retno Susilowati, MM
NIP: 195905201985032003

Indralaya, 21 November



Nama: Marcellio Susanto
NIM: 07041281722071

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcellio Susanto

NIM : 07041281722071

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim Asean Framework Agreement On Services Studi Kasus : Liberalisasi Jasa Keuangan”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 21 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

A red official stamp with a circular emblem in the center, overlaid with a handwritten signature in black ink.

Marcellio Susanto

NIM. 07041281722071

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya. Saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim Asean Framework Agreement On Services Studi Kasus : Liberalisasi Jasa Keuangan” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak hambatan yang peneliti alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
4. Bapak H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.,LL.D. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan arahan sejak awal masa kuliah hingga penyempurnaan skripsi.
5. Bapak Ferdiansyah R, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing kedua sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan sejak awal masa kuliah hingga penyempurnaan skripsi.
6. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
7. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

9. Admin Ilmu Hubungan Internasional Indralaya, Mba Siska dan Kak Dimas yang telah banyak membantu urusan administrasi selama masa perkuliahan.
10. Dipersembahkan kepada Papa, Mama, Tio, Grace serta Keluarga Besar lainnya yang selalu memberikan support baik secara moril dan materil.
11. Dipersembahkan kepada teman-teman terdekat Elvan, Darwin, Jensen, Rupi, Thoriq, Nazom, Roy, Pidi dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan.
12. Dipersembahkan kepada Oktivera Sanviana yang telah menemani, membantu serta memberikan dukungan dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
13. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Indralaya, 20 September 2022

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' with a stylized flourish at the end.

Marcellio Susanto

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR SINGKATAN.....	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Kerangka Konseptual.....	25
2.2.1. Kepatuhan Rezim International	25
2.2.2. Modes of Supply.	28
2.3. Alur Pemikiran.	30
2.4. Argumen Utama	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Desain Penelitian.	32
3.2. Definisi Konsep.	32

3.2.1. Liberalisasi Perdagangan.....	32
3.2.2. ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).....	33
3.2.3. Ratifikasi.....	33
3.2.4. Kepatuhan Rezim.....	34
3.3. Fokus Penelitian.....	35
3.4. Unit Analisis.....	36
3.5. Jenis dan Sumber data.....	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6.1. Studi Kepustakaan.....	37
3.6.2. Studi Dokumen.....	38
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	38
3.8. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	39
GAMBARAN UMUM PENELITIAN	39
4.1. Perkembangan Liberalisasi Jasa Keuangan	39
4.2. Asean Framework Agreement On Services (AFAS).....	43
BAB V	48
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1. Peraturan dan Kebijakan yang Di Adopsi Dari ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).....	48
5.2. Perubahan Perilaku / Alur Perdagangan Jasa Di Indonesia.....	55
5.3. Dampak, Perubahan, dan Pencapaian Perdagangan Jasa Keuangan di Indonesia.....	61
5.3.1. Sektor Perbankan Indonesia.....	64
5.3.2. Sektor Perasuransian Indonesia.....	66
BAB VI	70
PENUTUP	70
6.1. Kesimpulan.....	70
6.2. Saran.....	71
Daftar Pustaka.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Tabel 5.1 Protokol-Protokol AFAS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Persentase Premi Terhadap PDB 2011-2015

DAFTAR SINGKATAN

AFAS	: Asean Framework Agreement on Services
AFTA	: Asean Free Trade Area
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
GATS	: General Agreement on Trade in Services
MEA	: Masyarakat Ekonomi Asean
QAB	: Qualified Asean Bank
SoC	: Schedule of Commitmen
WTO	: World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perkembangan ekonomi yang ada di era sekarang ini berjalan lambat laun menuju kearah keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa yang akan menjadi jauh lebih besar lagi. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya ratifikasi kebijakan dan kesepakatan tarif dagang dan juga keterbukaan sektor jasa dalam sistem perdagangan Internasional. Dikarenakan kondisi ekonomi dunia yang lebih bebas serta juga terbuka, tidak lagi terdapat jalan yang lainnya untuk berbagai macam negara yang ada di dunia ini terkecuali untuk bisa terus melakukan suatu pengupayaan dalam hal peningkatan terhadap daya saing dengan cara melaluinya peningkatan terhadap efisiensi di bermacam-macam kegiatan. Dalam teori ekonomi, perdagangan global yang bebas dari yang namanya diskriminasi, secara umum bakal mendatangkan profit maupun keuntungan teruntuk berbagai macam negara yang menjalankan hal tersebut, walau diri kita harus mengakui bahwasanya manfaat yang diperoleh oleh tiap-tiap dari negara tidaklah bakal sama.

WTO ialah salah satu daripada organisasi yang terdapat di dunia yang melahirkannya suatu konsep liberalisasi perdagangan dunia. Dapat dilihat dari tujuan kenapa hal tersebut dibentuk, yakni supaya bisa menunjang sebuah perdagangan dunia guna bisa lebih jadi makin terbuka supaya arus dari perdagangan bisa mengalami perkembangan serta bisa menguranginya hambatan dari non-tarif ataupun tarif. Adapula berbagai macam macam aspek yang terdapat di dalam WTO, salah satunya ialah perdagangan jasa yang sudah diaturkan ke dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) serta salah satu dari lampiran (annex) disaat dilakukannya perjanjian perihal pembentukan WTO serta juga Schedule of Specific Commitments yang berisikan tentang

daftar komitmen Indonesia yang memiliki sifat yang spesifik serta juga bakal memberikan penjelasan terhadap suatu sektor dan sebuah transaksi yang ada pada sektor maupun bidang jasa manapun yang terbuka teruntuk pihak asing serta juga berbagai macam situasi maupun kondisi tertentu yang telah disyaratkan.

GATS meletakkan aturan-aturan dasar bagi perdagangan internasional di bidang jasa. GATS merupakan satu kesepakatan multilateral pertama yang telah pernah dihasilkan serta mempunyai dasar hukum dan bermacam-macam aturan yang mengatur perdagangan internasional pada sektor ataupun bidang jasa. Dengan mengamankan akses pasar serta tahapan liberalisasi dengan cara progresif, kesepakatan tersebut mendorong untuk terjadinya pertumbuhan perdagangan jasa-jasa layaknya yang sudah pernah dilakukan oleh GATT guna perdagangan barang dari sejak tahun 1947. Sebagai anggota WTO, negara Indonesia tentulah tidak bisa menghindar dari bermacam-macam perjanjian liberalisasi perdagangan, termasuknya juga perdagangan yang ada pada jasa pendidikan..

Indonesia sebagai bagian World Trade Organization (WTO), negara Indonesia sudah menandatangani final act dari Putaran Uruguay serta meratifikasikan dengan cara keseluruhan WTO Agreement pada UU No. 7 Tahun 1994 Mengenai Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Hal ini merupakan bentuk awal dari komitmen Indonesia teruntuk membuka pasar nya untuk negara yang lainnya, dengan harapan negara lain juga akan membuka pasarnya bagi Indonesia. Ada enam sektor jasa yang telah masuk Schedule of Commitmen Indonesia, di antaranya adalah :

1. Jasa bisnis;
2. Jasa telekomunikasi;
3. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
4. Jasa wisata dan perjalanan;

5. Jasa keuangan;

6. Jasa transportasi.

Walaupun liberalisasi perdagangan jasa sudah di atur secara jelas dalam WTO, namun banyak rezim di sebuah wilayah regional yang mengkonsolidasi peraturan dalam WTO untuk menjadi perjanjian kerjasama regional dengan tujuan memaksimalkan terwujudnya kepentingan sesama negara anggotanya. ASEAN sebagai organisasi regional hadir untuk menopang berbagai kepentingan dikawasan Asia Tenggara baik itu kepentingan politik, ekonomi dan juga sosial. Dalam bidang Ekonomi pada tahun 1992 negara – negara ASEAN bersepakat untuk membentuk AFTA (ASEAN Free Trade Area), dan Indonesia menjadi salah satu negara pelopor dalam pembentukan AFTA. Tujuan AFTA dibentuk diharapkan dapat menciptakan perdagangan kawasan ASEAN lebih produktif dan dapat berkompetisi dalam wilayah ASEAN maupun pasar global. Kemudian pada tahun 1995 muncul ide untuk tidak hanya meliberalisasi perdagangan barang saja, namun juga liberalisasi perdagangan jasa. Dengan adanya ide ini, negara negara ASEAN melakukan pertemuan di Bangkok, Thailand, dari hasil pertemuan dan perundingan ini dilahirkanlah *Asean Framework Agreement On Services* (AFAS), dan kemudian disahkan dalam KTT ke-5 ASEAN pada 15 Desember 1995. Dengan demikian, AFAS memberikan pedoman dan menjadi landasan dasar bagi negara-negara ASEAN untuk secara progresif meningkatkan akses pasar dan memastikan penerapan nasional yang sama bagi para pelaku ekonomi ASEAN dalam kerangka 'proses liberalisasi perdagangan jasa di kawasan. Oleh karena itu, AFAS sangat penting dalam memajukan keutuhan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi dan perdagangan jasa, maka dari itu untuk mencapai tujuan bersama negara-negara di ASEAN harus menghilangkan pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa di antara Negara-negara Anggota, meliberalisasi perdagangan jasa

dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi di luar yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota di bawah GATS dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di bidang jasa, komitmen masing-masing negara anggota akan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal ini.

Asean Framework Agreement On Services pada awalnya dibentuk sebagai sebuah perjanjian dalam upaya menuju arus bebas perdagangan jasa di kawasan ini dan AFAS bergerak melingkupi 7 sektor jasa di antaranya; Transportasi udara, Layanan bisnis, Konstruksi, Jasa keuangan, Transportasi laut, Telekomunikasi, dan Pariwisata. Meskipun ada 7 sektor jasa yang bergerak di bawah AFAS, namun negara-negara anggota ASEAN harus membuat daftar komitmen *National Treatment* dan akses pasar horizontal (semua sektor) dan sektor khusus mereka dalam jadwal yang menentukan kondisi untuk masuk dan perlakuan penyedia layanan asing berhadapan dengan penyedia layanan domestik di sektor-sektor ini. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan pembatasan perdagangan jasa antar negara ASEAN secara substansial. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing pemasok jasa ASEAN. Untuk Indonesia sendiri ada 2 (dua) *Schedule of Commitments* yang menjadi pokok pembahasan dalam perjanjian AFAS yaitu; Layanan penerbangan, dan Layanan keuangan, namun untuk penelitian ini penulis akan berfokus pada jasa keuangan, dan akan melihat sejauh apa kepatuhan Indonesia terhadap AFAS, jika di lihat dari bentuk komitmennya.

Jasa keuangan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu jasa keuangan perbankan dan jasa keuangan non-perbankan (Asuransi, Pegadaian, dan Leasing). Indonesia sudah meratifikasi Protokol ke 6 AFAS dan mengesahkan RUU yang mengatur pembukaan akses pasar jasa keuangan pada tanggal 26 April 2018. Tercatat bahwa sudah ada bank nasional yang berekspansi ke beberapa wilayah di ASEAN, namun dalam perjalanannya liberalisasi

jasa keuangan perbankan di ASEAN tidak berjalan mulus, seperti contoh, adanya hambatan Indonesia dalam ekspansi Bank Indonesia ke negara Malaysia dan Singapura, dimana negara tersebut memberikan hambatan yang terkesan mempersulit ekspansi Indonesia, seperti penyertaan modal bank yang tinggi pada negara Malaysia sebesar Rp. 985 Miliar dan pembatasan mesin ATM BI di wilayah tertentu. Kejadian yang serupa pun terjadi pada ekspansi Indonesia ke Singapura. Selain itu ada juga hambatan lainnya berupa dukungan insentif pemerintah terhadap bank nasional untuk melakukan ekspansi masih sangat terbatas. Saat ini ekspansi bank dari negara Singapura dan Malaysia akan dibatasi sementara waktu hal ini dikarenakan ketidakseimbangan jumlah antara bank Singapura dan Malaysia dengan bank nasional Indonesia. Lain hal nya Singapura dan Malaysia, keterbukaan Indonesia terhadap arus bebas perdagangan jasa keuangan sangatlah besar, bisa di lihat dari banyaknya perusahaan perbankan dan non-perbankan yang melakukan ekspansi ke Indonesia, dan juga menurut kajian Kementrian Keuangan indeks keterbukaan pasar modal di ASEAN, Indonesia menempati posisi nomor 2 dengan indeks keterbukaan 3,6 dibawah Thailand yang mempunyai indeks keterbukaan 4,3. Bisa kita lihat bahwa keterbukaan Indonesia ini merupakan salah satu contoh bentuk kepatuhan Indonesia terhadap AFAS.

Ketentuan – ketentuan apa saja yang harus dilakukan Indonesia untuk menunjukkan komitmennya kepada AFAS dapat kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 yang membahas tentang “Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)” Secara garis

besar hal yang harus dilakukan ataupun komitmen Indonesia dari awal ratifikasi AFAS sampai dengan sekarang ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Meskipun Indonesia sudah meratifikasi beberapa protokol AFAS dan mengesahkan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa keuangan di Indonesia, hal tersebut belum cukup untuk melihat kepatuhan Indonesia kepada AFAS. Maka dari itu dari ketentuan komitmen di atas membuat penulis ingin melihat dan menganalisa *outcome* dan *impact* dari ratifikasi ini juga, sehingga penulis bisa membahas tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap AFAS apakah Indonesia sudah melakukan komitmen tersebut secara keseluruhan, serta respon dan dampak bagi Indonesia itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah.

Bagaimana kepatuhan Indonesia kepada rezim *Asean Framework Agreement On Services* dalam sektor jasa keuangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis kebijakan perdagangan jasa keuangan di Indonesia Dalam kerangka *Asean Framework Agreement On Services*.
- b. Menganalisis tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim *Asean Framework Agreement On Services*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan sebuah kontribusi seperti sebuah masukan yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas bidang kajian yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan Informasi kepada khalayak luas yang memiliki kesamaan dalam masalah yang akan diteliti, serta memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Adlung, R., & Roy, M. (2005). Turning Hills Into Mountains? Current Commitments Under The General Agreement On Trade In Services And Prospects For Change. *Journal Of World Trade* 39.6, 1161-1194.
- AFAS, S. (2015). *Asean Framework Agreement On Services*. Retrieved 07 01, 2021, From ASEAN.Org: <https://www.asean.org/storage/images/2015/September/articles-on-AEC-2015/edited%20AFAS.pdf>
- Amala, F. (2015). DAMPAK KETERBUKAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEKTOR JASA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: PENDEKATAN PANEL DINAMIS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 114 - 124.
- Anward, R. J. (2018). IDENTIFYING THE IMPACT OF FINANCIAL LIBERALIZATION IN A SMALL OPEN ECONOMY: A CASE STUDY OF INDONESIA. *Jurnal Ecoplan Vol. 1 No. 1*, 1-7.
- Aristeus, S. (2014). PELUANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN INDONESIA DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Jurnal Recth Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 3. 2*, 145 - 162.
- Assidiq, F., & Munestri, S. L. (2017). Upaya Diplomasi Publik Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Sueakarta Dalam Rangka Menjadikan Kota Surakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional Tahun 2010-2015. *UNS-FISIP Jurnal Hubungan Internasional*.
- Bakry, U. S. (2015). *Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bappeda. (2022). *Data Base Lembaga Pembiayaan Bank Asing*. Retrieved 12 04, 2022, From Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: http://Pembiayaan.Bappeda.Jatimprov.Go.Id/?Page_Id=45
- Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics Of Unbalanced Growth: The Anatomy Of Urban Crisis. *The American Economic Review* 57.3, 415-426.
- Burhan, B. (2015). *KOMUNIKASI PARIWISATA (TOURISM COMMUNICATION): Pemasaran Dan Brand Destinasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Carsten, F., & Molinuevo, M. (2008). East Asian Preferential Trade Agreements In Services: Liberalization Content And WTO Rules. *World Trade Rev.* 7, 641-673.
- Diamond, L., & Mc.Donald, J. (1996). *Multi-Track Diplomacy: A System Approach To Peace-3rd Ed*. New York: Kumarian Press.

- Elda, A., & Agung, Y. (2016). Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Arab Saudi Pada Tahun 2014-2016. *Global Insight Jurnal Universitas 17 Agustus 1945*, 25.
- Ellyta, & Nuzulian, U. (2020). Diplomasi Indonesia Berbasis Program Cross Border Tourism Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. *Insignia Journal Of International Relations*, 1-16.
- Falkner, R. (2011). *International Political Economy*. London : The University Of London.
- George, S., & John, M. (2002). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Erlangga.
- Gideon, A. (2008, 11 03). *Mulai Hari Ini, Lippo Dan Niaga Resmi Merger*. Retrieved 01 12, 2022, From Kontan.Co.Id: <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Mulai-Hari-Ini-Lippo-Dan-Niaga-Resmi-Merger>
- Hadinoto, K. (1996). *Perencanaan Pengembangan Destinasi Wisata*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hardwick, P., & Dou, W. (2006). The Competitiveness Of EU Insurance Industries. *The Service Industries Journal*, 41.
- Hazime, H. (2011). From City Branding To E-Brands In Developing Countries; An Approach To Qatar And Abu Dhabi. *African Journal Of Business Management* 5(12), 4731-4745.
- Hennida, C. (2015). *Rezim Dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan Dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.
- Hidayah, F. N., & Roisah, K. (2017). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN PERDAGANGAN JASA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Jurnal Law Reform Vol 13. 1*, 45-59.
- Hoekman, B. (1990). *Services-Related Production, Employment, Trade, And Foreign Direct Investment: A Global Perspective*. Washington D.C: The World Bank.
- Hoekman, B. (2006). Liberalizing Trade In Services: A Survey. *World Bank And CEPR* , 2-5.
- Husein, U. (2001). *Strategi Manajemen In Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Idriasih, G. (2016). DIPLOMASI INDONESIA MELALUI KAMPANYE WONDERFUL INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL TAHUN 2011-2015 . *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP*.
- Indonesia, B. (2007). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007* . Jakarta: Bank Indonesia.
- Indonesia, B. (2012). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Indonesia, R. (2009). *Tentang Kepariwisataaan*. Jakarta.

- Internasional, D. J. (2018, 06 26). Retrieved 01 06, 2022, From Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/perdagangan-jasa/perundingan-jasa/regional>
- Johana, K., Setiadarma, D., & Wijaya, K. D. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS “BALI BARU” DI KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 632.
- Johana, K., Setiadarma, D., & Wijaya, K. D. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS “BALI BARU” DI KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA. *JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi)*, 2686-4916.
- Kavaratziz, M., & Asworth, G. (2015). City Branding: An Effective Assertion Of Identity Or A Transitory Marketing Trick? *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 96(5), 506-514.
- Keohane, R. O., & Joseph, S. N. (2011). *Power And Interdependene*. London: Longman.
- Ketut, S. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Bali: Pustaka Larasan.
- Komariah, A., & Djaman, S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kotler, P. (2002). *Manajemen Pemasaran 1*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Latifah, E. (2011). Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan Melalui Kebijakan Open Sky Dan Implikasinya Bagi Indonesia. *JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 18*, 1 - 19.
- Lestari, R. B. (2016). Membangun Citra Sebuah Kota Dalam Persaingan Global Melalui City Branding. *5(2)*, 68-79.
- Low, L. (2001). Globalisation And Poverty Reduction: Can The Rural Poor Benefit From Globalisation?: An Asian Perspective . *Department Of Business Policy National University Of Singapore* , 3-5.
- Markusen, J. (1989). Trade In Producer Services And In Other Specialized Intermediate Inputs. *American Economic Review* , 79-95.
- Mayliya, V. F. (2019). KEPATUHAN INDONESIA PADA AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STUDI KASUS: PEMALSUAN PRODUK FASHION TAHUN 2010-2015. *Journal Of International Relations, Volume 5, Nomor 2*, 291289.
- Mitchell, R. B. (2000). *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, And Behaviour Change In International Environmental Law*. London: Oxford University Press.
- Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal Di Fora Internasional. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 85-94.

- Munarika, N. (2018). STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN ANGGOTA PENABUNG DENGAN AKAD WADI'AH DI KANTOR PUSAT BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) PAHLAWAN TULUNGAGUNG. *IAIN TULUNGAGUNG*, 15.
- Nasional, B. P. (2015). *Naskah Akademis Pengesahan Protokol To Implement The Sixth Package Of AFAS*. Jakarta: BPHN.
- OECD. (2003, June 4). *Quantifying The Benefits Of Liberalising Trade In Services*. Retrieved 2 14, 2021, From OECD LIBRARY: https://www.oecd-ilibrary.org/quantifying-the-benefits-of-liberalising-trade-in-services_51mqcr2k3v7d.pdf?Itemid=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264100435-En&Mimetype=Pdf
- OJK. (2017). *Daftar Jaringan Kantor Bank Umum Dan Syariah Indonesia Di Luar Negeri*. Retrieved 04 12, 2022, From Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/pages/daftar-jaringan-kantor-bank-umum-indonesia-di-luar-negeri.aspx>
- Pudjiastuti, T. N. (2016). ASEAN FTAS DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA ; TANTANGAN JASA TENAGA KERJA BAGI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Politik Vol : 7*, 16.
- Qu, H., Kim, L., & Im, H. (2011). A Model Of Destination Branding: Integrating The Concepts Of The Branding And Destination Image. *Tourism Management*, (32(3)), 465-476.
- Rachmah, A. G. (2018). Peran Rezim Trans Pacific Partnership (TPP) Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Negara. *Journal Of International Relations, Volume 4, Nomor 4*, 888-895.
- Rahayu, A. Y., & Maksum, I. R. (2015). The Role Of Government In Msmes: The Empowerment Of Msmes During The Free Trade Era In Indonesia. *Australasian Accounting, Business And Finance Journal*, 24.
- Ritchie, J. B., & Ritchie, R. J. (1998). THE BRANDING OF TOURISM DESTINATIONS. *Association Of Scientific Experts In Tourism*, 8-17.
- Stokes, R. (2008). Tourism Strategy Making: Insights To The Events Tourism Domain. *Tourism Management* 29, 252-262.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwani, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumaco, F. T., & Richardson, S. (2011). An Analysis On International Tourists' Perceptions Towards Destination Branding: "Visit Indonesia 2008" Marketing Campaign. *International Research Symposium In Service Management*, 474.

- Suparman, N., Silva, D., & Sudirman, A. (2017). *Regionalisme Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaodih, S. N. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Valencia, Bela, P. A., & Deliyanto, B. (2020). Strategi Branding Destinasi Wisata Pantai Tanjung Kelayang (Objek Studi: Pantai Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *STUPA (Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur)*, 2575-2588.
- Velasco, M. (2016). Tourism Policy. *Global Encyclopedia Of Public Administration, Public Policy, And Governance*, 1-2.
- Wasesa, Agung, S., & Macnamara, J. (2010). *Strategi Public Relations*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- WTO. (2006, Maret 29). Retrieved Januari 5, 2022, From World Trade Organization: https://www.wto.org/Search/Search_E.aspx?Search=Basic&Searchtext=Modes%20of%20supply&Method=Pagination&Pag=1&Roles=,Public,
- Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: ANGKASA.
- Young, O. R. (2011). *Compliance & Public Authority*. New York: RFF Press.
- Yuristhiadi, G., & Sari, S. D. (2017). Strategi Branding Pariwisata Indonesia Untuk . *ETTISAL Journal Of Communication*.
- Zhou, L., & Wang, T. (2014). Social Media: A New Vehicle For City Marketing In China. *Cities*, 27-32.
- Zukhri, N., Haryadi, D., & Cholilah, J. (2015). *BRANDINGISASI WISATA : Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Momentum Laskar Pelangi Di Pulau Belitung*. Yogyakarta: Istana Media.